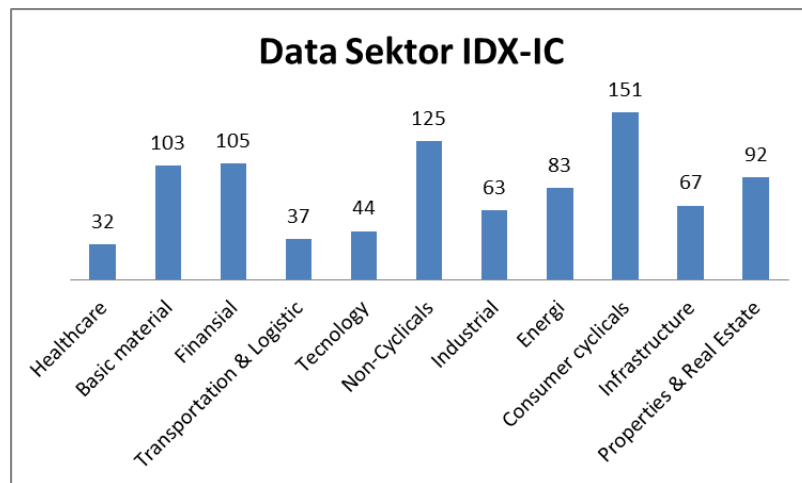


BAB I

LATAR BELAKANG

1.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

Bursa Efek Indonesia (BEI) dibentuk melalui penggabungan Bursa Efek Jakarta (BEJ) dengan Bursa Efek Surabaya (BES) dan mulai beroperasi pada 1 Desember 2007. Bursa Efek Indonesia (BEI) bertugas menyelenggarakan dan menyediakan sistem atau sarana untuk perdagangan efek yang merupakan aset yang diperdagangkan untuk tujuan investasi. Bursa Efek Indonesia (BEI) telah menerapkan aturan baru dimana klasifikasi JASICA (*Jakarta Stock Exchange Industrial Classification*) digantikan oleh IDX-IC (*Indonesia Stock Exchange Industrial Classification*). IDX-IC mengelompokkan perusahaan berdasarkan eksposur pasar terhadap produk yang mereka produksi, terdiri dari 4 tingkat klasifikasi yang meliputi 12 sektor, 35 sub-sektor, 69 industri, dan 130 sub-industri.



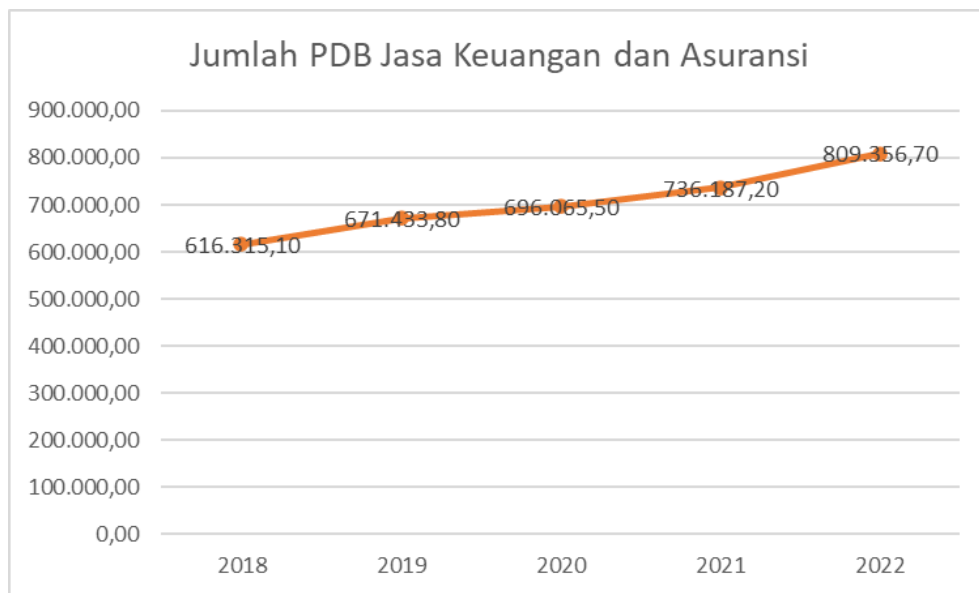
Gambar 1. 1 Data Jumlah Perusahaan pada Sektor yang Terdaftar di IDX-IC

Sumber: Data diolah dari IDX-IC (2023)

Gambar 1.1 memperlihatkan total perusahaan di sektor yang terdaftar di IDX-IC (*Indonesia Stock Exchange Industrial Classification*), berjumlah 902 perusahaan. Terdapat 4 sektor dengan jumlah perusahaan terbanyak, yaitu *Consumer Cyclicals* dengan 151 perusahaan, *Non-Cyclicals* dengan 125

perusahaan, *Financial* dengan 105 perusahaan, dan *Basic Material* dengan 103 perusahaan.

Dari 902 perusahaan yang terdaftar, sektor keuangan dengan 105 perusahaan menjadi salah satu yang paling menonjol. Di antara empat sektor utama lainnya, sektor keuangan menonjol sebagai yang paling penting. Walaupun bukan yang terbesar, sektor ini berperan signifikan dalam pasar modal, menunjukkan eksistensi yang kuat dan memberikan kontribusi besar terhadap ekonomi Indonesia. Dengan 105 perusahaan, sektor keuangan berfungsi sebagai salah satu pilar utama dalam pembentukan struktur pasar modal Indonesia dan memainkan peran vital dalam menyediakan layanan keuangan, melakukan intermediasi, dan mendukung pertumbuhan bisnis di berbagai industri lainnya.



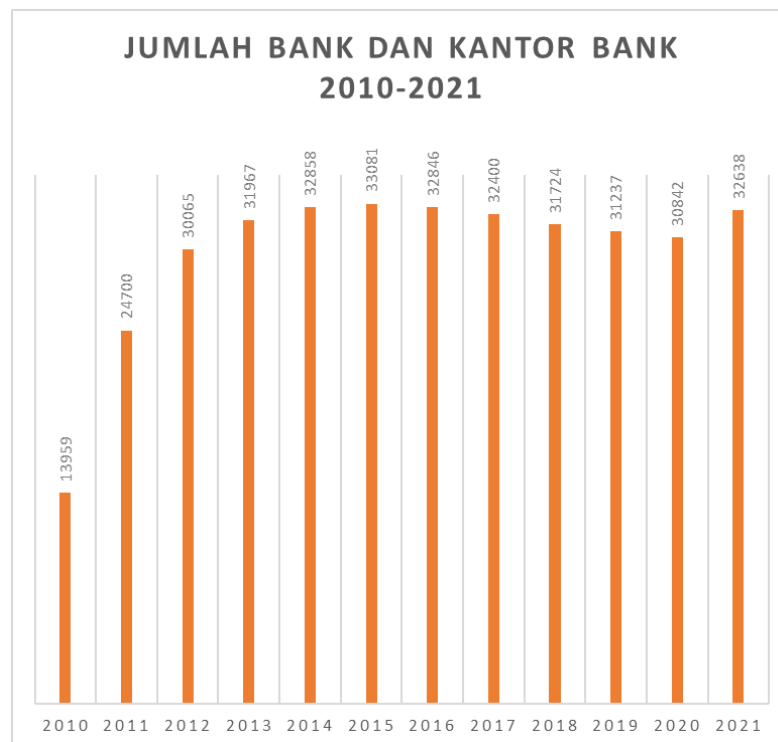
Gambar 1. 2 Jumlah PDB Jasa Keuangan dan Asuransi

Sumber: Data diolah dari bps.go.id (2023)

Gambar 1.2 menunjukkan produk domestik bruto (PDB) yang dihasilkan oleh sektor jasa keuangan dan asuransi dari tahun 2018 hingga 2022. Data ini menunjukkan tren pertumbuhan yang stabil setiap tahun. Pada tahun 2018, produk domestik bruto (PDB) sektor ini mencapai 616.315,10 unit. Selama tahun-tahun berikutnya, produk domestik bruto (PDB) meningkat secara signifikan mencapai 671.433,80 pada tahun 2019, 696.065,50 pada tahun 2020, dan 736.187,20 pada tahun 2021. Puncak pertumbuhan terlihat pada tahun 2022 dengan produk

domestik bruto (PDB) mencapai 809.356,70 unit. Tren ini menegaskan pentingnya sektor jasa keuangan dan asuransi dalam mendukung pertumbuhan ekonomi, serta menunjukkan kestabilan dan potensi pertumbuhan di masa depan.

Penelitian ini memberikan pemahaman mendalam mengenai peran industri jasa keuangan dan asuransi dalam mencapai kemajuan berkelanjutan. Penelitian ini mengungkap kontribusi spesifik sektor ini terhadap pembangunan berkelanjutan dengan meneliti hubungan antara produk domestik bruto (PDB) sektor ini dan faktor-faktor *environmental, social, and governance* (ESG). Tujuan dari penelitian ini adalah mengidentifikasi bagaimana investasi di sektor jasa keuangan dan asuransi mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dan dampaknya terhadap lingkungan. Dengan berinvestasi dalam program yang ramah lingkungan, seperti konservasi lingkungan atau proyek energi terbarukan, sektor ini dapat menjadi penggerak utama dalam transisi menuju ekonomi yang lebih berkelanjutan.



Gambar 1.3 Jumlah bank dan Kantor Bank di Indonesia Tahun 2010-2021

Sumber: Data diolah dari Badan Pusat Statistik (2023)

Gambar 1.3 mengenai pertumbuhan jumlah bank dan kantor bank di Indonesia dari tahun 2010 hingga 2021, menunjukkan perkembangan infrastruktur

perbankan yang signifikan. Selama periode ini, jumlah bank terus bertambah, mencerminkan pertumbuhan industri keuangan dalam menyediakan layanan kepada masyarakat. Pada tahun 2010, jumlah bank tercatat sebanyak 13.959, namun meningkat menjadi 32.638 pada tahun 2021, hampir dua kali lipat dalam 11 tahun.

Sektor perbankan sebagai fokus *environmental, social, and governance* (ESG), memainkan peran penting dalam mendorong perubahan menuju keberlanjutan. Perbankan telah menjadi faktor krusial yang dapat mempengaruhi perubahan di masyarakat dan lingkungan, terutama di era yang semakin menyadari pentingnya praktik bisnis yang bertanggung jawab terhadap lingkungan, sosial, dan tata kelola yang baik. Perbankan memiliki kekuatan untuk mendorong praktik bisnis berkelanjutan, mengurangi dampak lingkungan, dan mempromosikan inklusi sosial serta pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Dalam sektor perbankan, upaya *environmental, social, and governance* (ESG) tidak hanya berfokus pada mempengaruhi perusahaan yang didanai, tetapi juga menciptakan landasan kuat untuk transformasi menuju dunia bisnis yang lebih inklusif dan berkelanjutan secara keseluruhan.

1.2 Latar Belakang Penelitian

Perusahaan aktif terlibat dan melaporkan praktik *environmental, social, and governance* (ESG) untuk memperoleh keuntungan strategis dan finansial. Selain itu, perusahaan menetapkan tujuan non-finansial dalam aktivitas *environmental, social, and governance* (ESG) dan melaporkan praktik *environmental, social, and governance* (ESG) mereka untuk menciptakan standar akuntabilitas baru yang mencerminkan komitmen sukarela terhadap tujuan non-keuangan (Aryssi dkk., 2020). *Sustainable and responsible investment* (SRI) telah mengalami kemajuan signifikan dalam dekade terakhir, membantu investor, pemegang saham, pemerintah, dan perusahaan yang membutuhkan informasi yang akurat tentang aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola (ESG) yang sekarang merupakan bagian dari strategi kompetitif (Escrig-Olmedo dkk., 2019).

Environmental, social, and governance (ESG) dimanfaatkan oleh pasar modal untuk mengevaluasi kinerja non-keuangan perusahaan, termasuk kinerja

lingkungan (*Environmental*), sosial (*Social*), dan tata kelola (*Governance*). *Environmental, social, and governance (ESG)* melibatkan pengungkapan atau pelaporan, dan merupakan alat komunikasi perusahaan dengan para pemangku kepentingan terkait isu lingkungan, sosial, dan tata kelola (Risma Septiana & Puspawati, 2022).

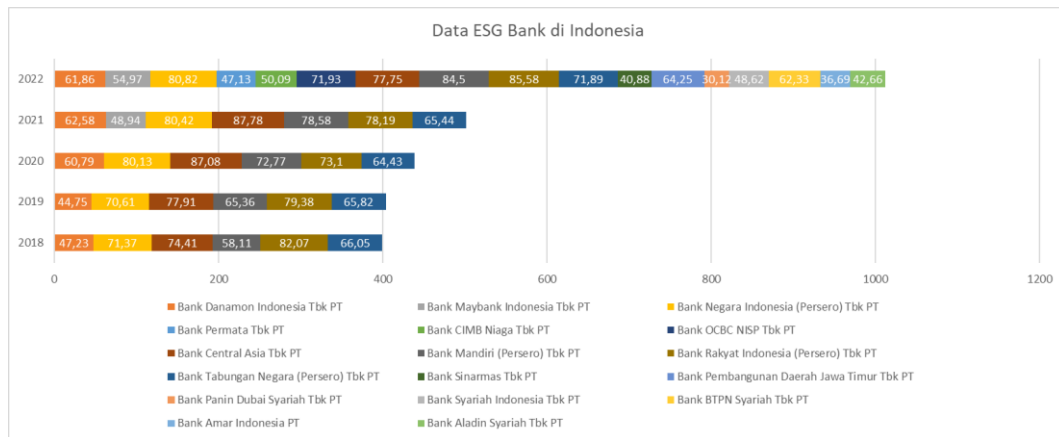
Score environmental, social, and governance (ESG) bertujuan untuk meningkatkan transparansi kepada pemangku kepentingan seperti investor, konsumen, dan masyarakat umum, sehingga membantu mereka membuat keputusan yang lebih berinformasi dan bertanggung jawab (Nicolo dkk., 2023). Dengan meningkatnya kesadaran akan isu lingkungan dan sosial, ESG telah menjadi komponen kritis dalam evaluasi investasi dan pengambilan keputusan bisnis. Hal ini memungkinkan evaluasi kinerja jangka panjang perusahaan, mendorong praktik bisnis yang berkelanjutan, dan menggalakkan peningkatan tanggung jawab sosial dan lingkungan dalam konteks bisnis (Shaïd, 2023).

Score environmental, social, and governance (ESG) mencerminkan kinerja perusahaan dalam mengelola risiko dan peluang lingkungan, sosial, dan tata kelola. Dampak lingkungan dari aktivitas perusahaan, hubungan dengan karyawan, interaksi dengan masyarakat lokal, kepatuhan terhadap regulasi, struktur perusahaan, komposisi dewan direksi, dan transparansi laporan keuangan adalah beberapa aspek yang dinilai dalam skor ini. Semakin meningkatnya skor *environmental, social, and governance (ESG)* menjadi faktor penting dengan meningkatnya perhatian investor, pemangku kepentingan, dan pasar terhadap tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan dalam pengambilan keputusan investasi. Perusahaan dengan skor *environmental, social, and governance (ESG)* yang tinggi memiliki daya tarik bagi investor yang memperhatikan praktik bisnis yang berkelanjutan dan bertanggung jawab, serta memperkuat reputasi mereka dalam jangka panjang (Lestari, 2022).

Perbankan di sektor keuangan memegang peran krusial dalam mendorong praktik berkelanjutan. Perbankan memiliki potensi besar untuk mempromosikan praktik *environmental, social, and governance (ESG)* di kalangan perusahaan sebagai salah satu pilar utama industri keuangan. Andy Asmoro, *Chief Economist*

Bank Mandiri, menjelaskan beberapa alasan mengapa sektor perbankan harus lebih terlibat dalam bidang keberlanjutan. Pertama dan terutama, perbankan memiliki keterkaitan yang erat dengan keberlanjutan karena mereka memiliki tanggung jawab terhadap alokasi sumber daya. Bank dapat memiliki pengaruh yang signifikan terhadap masyarakat dan lingkungan melalui keputusan mereka dalam pembiayaan. Selain itu, mengelola risiko reputasi juga menjadi hal penting. Konsumen dan investor semakin mempertimbangkan aspek *environmental, social, and governance (ESG)* dalam proses pengambilan keputusan mereka, sebagaimana yang ditunjukkan oleh penelitian Mandiri *Institute* mengenai penerapan *environmental, social, and governance (ESG)* (Noviani, 2023).

Perbankan Indonesia semakin menyadari pentingnya prinsip *environmental, social, and governance (ESG)*, tetapi tidak semua bank yang terdaftar di *Indonesia Stock Exchange (IDX)* menerapkan *environmental, social, and governance (ESG)* secara menyeluruh dalam operasional mereka. Di antara berbagai lembaga keuangan, terdapat variasi yang signifikan dalam tingkat adopsi dan implementasi *environmental, social, and governance (ESG)*, beberapa telah mengintegrasikan *environmental, social, and governance (ESG)* ke dalam strategi bisnis inti mereka, sementara yang lain masih dalam proses pengembangan dan implementasi yang lebih terbatas. Adopsi *environmental, social, and governance (ESG)* oleh bank-bank di *IDX* dipengaruhi utamanya oleh tantangan teknis dalam pengukuran dan pelaporan kinerja *environmental, social, and governance (ESG)*, hambatan regulasi, dan kurangnya pemahaman mendalam mengenai manfaat jangka panjang dari pendekatan berkelanjutan.



Gambar 1. 4 Penerapan ESG pada Sub-Sektor Perbankan 2018-2022

Sumber: Data diolah dari Thomson Reuters (2023)

Data yang ditampilkan hanya sebagian dari penelitian

Gambar 1.4 mengilustrasikan perkembangan ESG (*Environmental, Social, and Governance*) di sektor perbankan Indonesia dari tahun 2018-2022. Meskipun beberapa bank telah memperlihatkan peningkatan konsistensi dalam kinerja ESG mereka dari tahun ke tahun, ada juga yang belum menyediakan data yang jelas terkait hal ini. Selama periode yang diamati, nilai ESG beberapa bank, seperti Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, dan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk terus meningkat. Namun, tantangan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas di sektor ini ditunjukkan oleh masih adanya sejumlah organisasi yang belum mengungkapkan data ESG mereka secara menyeluruh.

Sektor perbankan telah merasakan banyak manfaat dari penerapan perbankan hijau, terutama dalam meningkatkan reputasi perusahaan dimata investor. Beberapa bank melakukan berbagai penerapan sebagai implementasi prinsip *environmental, social, and governance (ESG)* untuk mendukung keberlanjutan dan tanggungjawab sosial, salah satunya PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk yang terus mengimplementasikan prinsip *environmental, social, and governance (ESG)* dengan berpartisipasi aktif dalam penyelenggaraan bursa karbon pada September 2023 sebagai bagian dari kontribusi dalam mencapai target mitigasi perubahan iklim yang dicanangkan dalam enhanced-NDC Indonesia, BRI juga mematuhi Peraturan OJK Nomor 51 tahun 2017, yang

mengharuskan penyusunan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB), Laporan Berkelanjutan, serta alokasi dana untuk Tanggung Jawab Sosial Lingkungan (TJSL). Pada akhir Juni 2023, BRI juga melakukan penyaluran kredit Rp79,4 triliun yang digunakan dalam Kegiatan Usaha Berwawasan Lingkungan (KUBL), termasuk proyek energi terbarukan dan transportasi hijau, serta menerbitkan ESG-themed bonds seperti green bonds (Syahputra, 2022). Namun, dalam penerapan *environmental, social, and governance (ESG)* masih terdapat beberapa masalah yang perlu diatasi. Pertama, batasan proyek tetap ada karena nasabah menghadapi kesulitan memenuhi persyaratan seperti sertifikasi ISPO/RSPO atau investasi dalam teknologi hijau untuk masuk ke sektor hijau. Selain itu, biaya dan keuntungan ekonomi seperti pencemaran udara dan air belum dimasukkan ke dalam harga, menimbulkan tantangan khusus. Investor yang peduli dengan isu lingkungan dan sosial kesulitan menemukan tempat atau perusahaan untuk berinvestasi, serta kekurangan informasi dan alat yang diperlukan untuk menganalisis investasi ramah lingkungan. Regulasi, struktur, dan standarisasi produk masih dalam proses pengembangan, sehingga ekosistem keuangan hijau masih dalam tahap perencanaan.

Selain itu, portofolio pembiayaan hijau yang terbatas dan ketiadaan data pendukung menjadi masalah. Terutama berlaku karena tidak adanya standar pelaporan global dan metode untuk mengukur risiko finansial terkait iklim yang belum dimasukkan dalam neraca bank. Karena kurangnya insentif bagi perusahaan, penerapan prinsip ESG juga terdampak oleh minimnya insentif, terutama dengan biaya sertifikasi dan pungutan *green bond* yang tidak signifikan. Selain itu, penerapan ESG menjadi kurang optimal karena aturan yang cenderung hanya memberikan rekomendasi tanpa insentif atau sanksi. Padahal, insentif dan sanksi dapat mendorong bank dan lembaga keuangan lainnya untuk lebih giat menerapkan prinsip-prinsip tersebut (IMAGAMA, 2022).

Peraturan seperti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 51/POJK.03/2017, yang bertujuan mencapai pembangunan berkelanjutan dengan keseimbangan lingkungan, sosial, dan ekonomi, menjadi contoh implementasi prinsip ESG (*Environmental, Social, and Governance*) di Indonesia. Untuk

mendukung keuangan berkelanjutan, peraturan ini mengatur sektor jasa keuangan, emiten, dan perusahaan publik. Sementara itu, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) merilis Pedoman *Asesmen* Penerapan ESG pada BUMN pada April 2023. Pedoman ini menjelaskan indikator lingkungan, sosial, dan tata kelola untuk meningkatkan nilai BUMN dan mendukung pencapaian target Tambahan Sumbangan Ditentukan Nasional (NDC) Indonesia. Namun, hingga saat ini, belum ada standar yang mengikat untuk seluruh industri, dan peraturan ESG di Indonesia masih berfokus pada sektor tertentu serta menekankan kebijakan internal perusahaan.

Karena kurangnya dukungan pemerintah yang menyebabkan keterlambatan penerapan di sektor lain, implementasi ESG belum mencapai tingkat optimalnya. Untuk memajukan praktik ESG, pemerintah harus berkomitmen membuat undang-undang yang mengatur secara menyeluruh mengenai ESG, menciptakan ruang investasi, dan mendorong perusahaan untuk mematuhi prinsip dan standar ESG. Ini bisa dilakukan dengan merujuk pada undang-undang seperti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menekankan perekonomian berdasarkan asas kekeluargaan (Fachri, 2023).

Terkait kebijakan *environmental, social, and governance (ESG)* dan kinerja perusahaan, tekanan untuk meningkatkan transparansi semakin meningkat. Pasar dan para pemegang saham yang menggunakan *environmental, social, and governance (ESG)* sebagai penilaian terhadap manajemen perusahaan juga menyoroti hal ini, seperti yang terlihat dari peningkatan jumlah perusahaan yang melaporkan data ESG dan peningkatan fokus pada masalah keberlanjutan dalam beberapa tahun terakhir (Nicholas Sirait, 2024). Meskipun ada permintaan yang kuat dari masyarakat untuk keterbukaan ini, masih ada pertanyaan tentang motif di balik pengungkapan data terkait ESG.

Keberadaan dewan direksi yang memiliki peran krusial dalam manajemen suatu perusahaan adalah bukti bahwa tata kelola perusahaan memainkan peran penting dalam meningkatkan transparansi informasi perusahaan (Lee dkk., 2023).

Dewan direksi memainkan peran utama dalam tata kelola perusahaan dengan menetapkan kebijakan dan melindungi kepentingan investor di masa depan. Mereka harus mampu menentukan kebijakan yang tepat serta mengelola sumber daya perusahaan untuk jangka pendek dan jangka panjang. Dengan pelaporan terintegrasi, direksi dapat lebih mudah mengambil keputusan yang meningkatkan nilai perusahaan di masa mendatang (Hapsari dkk., 2019). Selain itu, kepemimpinan dewan direksi berperan sentral dalam mengembangkan strategi dan kebijakan yang mempengaruhi kinerja perusahaan (Nicolo dkk., 2023). Pengawasan aktivitas perusahaan oleh dewan direksi sangat penting dan ada pandangan bahwa jumlah anggota dewan yang lebih besar dapat berkontribusi positif terhadap kinerja dan nilai perusahaan (Mastura Baharudin dkk., 2023). Menurut penelitian oleh Suprapti dkk., (2019), sebuah perusahaan tidak akan secara aktif mengungkapkan informasi lingkungan hanya karena keberadaan dewan direksi. Meskipun berperan sebagai perwakilan dari pemangku kepentingan, dewan direksi tidak secara langsung mengawasi manajemen terkait keterbukaan informasi lingkungan karena tugas ini sudah menjadi tanggung jawab manajemen perusahaan. Penelitian sebelumnya oleh Nicolo dkk., (2023), Nicholas Sirait, (2024), dan Gurol & Lagasio, (2023) menunjukkan bahwa ukuran dewan mempengaruhi ESG, sementara penelitian oleh Kristanti & Fahrezi (2023) dan Risma Septiana & Puspawati (2022) menunjukkan bahwa ukuran dewan tidak berpengaruh terhadap ESG. Perspektif yang berbeda antara perempuan dan laki-laki di dalam *women on the board* dapat menciptakan suasana baru yang mendorong terbentuknya gagasan dan strategi inovatif bagi perusahaan (Ismail & Latiff, 2019). Opini serta pandangan dari perempuan di dewan direksi juga berperan dalam memfasilitasi proses pengambilan keputusan strategis perusahaan, termasuk dalam peningkatan fokus pada *environmental, social, and governance* (ESG). Penelitian tentang kehadiran perempuan di dewan menunjukkan bahwa hal ini secara positif mempengaruhi pengungkapan informasi terkait Lingkungan, Sosial, dan Tata Kelola (LST) perusahaan. Dari sini, dapat disimpulkan bahwa keberadaan perempuan di Dewan Direksi cenderung mendorong perusahaan untuk lebih proaktif dalam melaksanakan tindakan (Lee dkk., 2023). Penelitian yang

dilakukan oleh Arayssi dkk. (2020), Gurol & Lagasio (2023), Lee dkk., (2023), dan Nicolo dkk., (2023) menunjukkan bahwa *women on the board* berpengaruh terhadap pengungkapan ESG. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Risma Septiana & Puspawati (2022) menunjukkan bahwa Dewan Direksi Perempuan (*Women on the board*) berpengaruh negatif terhadap pengungkapan ESG.

Peran komisaris independen dalam tata kelola perusahaan sangat penting, terutama dalam memastikan kualitas laporan keuangan, menengahi konflik internal, serta mengawasi kebijakan dan memberikan saran kepada manajemen (Uzliawati dkk., 2023). Komisaris independen dipilih karena keahlian dan pengalaman mereka di bidang terkait (Muslih & Mulyaningtyas, 2019). Dengan jumlah komisaris independen yang lebih besar, komunikasi terkait pengungkapan ESG dapat diperkuat, karena mereka lebih mampu mengevaluasi kekhawatiran masyarakat dan pemangku kepentingan, serta meningkatkan respons perusahaan terhadap isu-isu keberlanjutan dan tanggung jawab sosial (Kristanti & Fahrezi, 2023). Komisaris independen juga dapat membantu menengahi konflik antara pemegang saham dan membuat manajer merasa lebih baik tentang apa yang mereka lakukan (Baharuddin, 2022). Menurut penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh (Risma Septiana & Puspawati, 2022) dan (Nicholas Sirait, 2024) pengungkapan ESG dipengaruhi oleh Komisaris Independen. Sebaliknya, penelitian yang dilakukan oleh (Kristanti & Fahrezi, 2023) menemukan bahwa komisaris independen tidak berpengaruh terhadap pengungkapan ESG.

Komite Audit yang independen dan proaktif memegang peranan penting dalam mengatasi masalah insentif manajemen. Menurut penelitian yang ada, keberadaan komite audit meningkatkan kualitas dan keandalan laporan keuangan serta membantu dewan perusahaan dalam membuat keputusan yang lebih baik untuk pemegang saham (Nicolo dkk., 2023). Tata kelola perusahaan yang baik seringkali dinilai dari kehadiran anggota independen di dalam dewan direksi atau komite tertentu. Tata kelola perusahaan akan sukses jika setiap individu yang terlibat melaksanakan tugas mereka dengan baik, yang pada akhirnya meningkatkan kinerja perusahaan (Hapsari dkk., 2023). Fama & Jensen (1983) menekankan bahwa fungsi pengawasan komite audit akan lebih efektif bila

dilakukan oleh anggota yang independen. Hal ini dikarenakan anggota independen tidak memiliki ikatan pribadi atau hubungan dengan manajemen, sehingga memungkinkan komite audit untuk bekerja secara objektif tanpa intervensi dari pihak lain. Peran pengawasan yang dilakukan oleh anggota independen dianggap dapat mengurangi kemungkinan manajemen melakukan kecurangan. Karena itu, transparansi dalam proses pelaporan dan upaya untuk mengurangi perbedaan informasi menjadi hal penting yang perlu diperhatikan oleh komite audit (Josua & Septiani, 2020). Penelitian terdahulu oleh Suprpti dkk., (2019) menunjukkan bahwa komite audit mempengaruhi pengungkapan ESG dengan baik. Sebaliknya, penelitian oleh Kristanti & Fahrezi (2023) menemukan bahwa komite audit tidak mempengaruhi pengungkapan ESG dengan baik.

1.3 Rumusan Masalah

Di Indonesia, tren investasi berbasis *environmental, social, and governance (ESG)* terus meningkat, namun penerapan perusahaan dalam pengungkapan ESG masih rendah. Penting dicatat bahwa perusahaan yang aktif mengungkapkan aspek ESG cenderung menarik minat lebih banyak investor. Mereka menunjukkan kecenderungan untuk meningkatkan jumlah modal ekuitas dibandingkan dengan perusahaan yang belum terlibat dalam pengungkapan ESG. Hal ini mencerminkan potensi kuat bagi perusahaan-perusahaan yang lebih aktif menerapkan prinsip-prinsip ESG untuk menarik perhatian investor.

Kebijakan terkait *environmental, social, and governance (ESG)* semakin mendorong perusahaan untuk lebih transparan. Pasar dan pemegang saham semakin menekan perusahaan untuk mengukur manajemen mereka menggunakan ESG. Fenomena ini terlihat dari meningkatnya jumlah perusahaan yang mengungkapkan data ESG serta peningkatan fokus pada isu-isu keberlanjutan dalam beberapa tahun terakhir. Namun, dibalik dorongan publik untuk transparansi muncul pertanyaan mengenai motif dibalik pengungkapan data ESG. Dewan direksi yang memainkan peran krusial dalam mengelola perusahaan, membuktikan bahwa tata kelola perusahaan memegang peranan kunci dalam meningkatkan transparansi informasi perusahaan.

Pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan semakin menjadi perhatian utama. Konsep *environmental, social, and governance (ESG)* telah menjadi fokus utama dalam upaya untuk mengarahkan perusahaan ke arah yang lebih berkelanjutan. Namun, tantangan utama yang muncul adalah bagaimana ESG dapat diterapkan dan dipantau secara optimal dalam kerangka bisnis. Perumusan masalah ini bertujuan untuk mengeksplorasi masalah utama yang dihadapi oleh perusahaan dalam menerapkan prinsip-prinsip ESG secara menyeluruh dan efektif, maka terdapat beberapa pertanyaan tentang penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana ukuran dewan, *women on the board*, komisaris independen, komite audit dan *Environmental, social, and governance (ESG)* pada perusahaan sub-sektor Perbankan yang terdaftar di BEI periode 2010-2022?
2. Apakah ukuran dewan, *women on the board*, komisaris independen, dan komite audit berpengaruh secara simultan terhadap *Environmental, social, and governance (ESG)* pada perusahaan sub-sektor Perbankan yang terdaftar di BEI periode 2010-2022?
3. Apakah secara parsial:
 - a. Ukuran Dewan berpengaruh terhadap *Environmental, social, and governance (ESG)* pada perusahaan sub-sektor Perbankan yang terdaftar di BEI periode 2010-2022?
 - b. *Women on the board* berpengaruh terhadap *Environmental, social, and governance (ESG)* pada perusahaan sub-sektor Perbankan yang terdaftar di BEI periode 2010-2022?
 - c. Komisaris Independen berpengaruh terhadap *Environmental, social, and governance (ESG)* pada perusahaan sub-sektor Perbankan yang terdaftar di BEI periode 2010-2022?
 - d. Komite Audit berpengaruh terhadap *Environmental, social, and governance (ESG)* pada perusahaan sub-sektor Perbankan yang terdaftar di BEI periode 2010-2022?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang disampaikan sebelumnya, penulis menetapkan tujuan yang ingin diperoleh dari penelitian ini, tujuan tersebut sebagai berikut:

1. Mengetahui pengaruh penerapan ukuran dewan, *women on the board*, komisaris independen, komite audit dan *Environmental, social, and governance (ESG)* pada perusahaan sub-sektor Perbankan yang terdaftar di BEI periode 2010-2022
2. Mengetahui pengaruh ukuran dewan, *women on the board*, komisaris independen, dan komite audit berpengaruh secara simultan terhadap *Environmental, social, and governance (ESG)* pada perusahaan sub-sektor Perbankan yang terdaftar di BEI periode 2010-2022
3. Mengetahui pengaruh secara parsial:
 - a. Ukuran Dewan terhadap *Environmental, social, and governance (ESG)* pada perusahaan sub-sektor Perbankan yang terdaftar di BEI periode 2010-2022
 - b. *Women on the board* terhadap *Environmental, social, and governance (ESG)* pada perusahaan sub-sektor Perbankan yang terdaftar di BEI periode 2010-2022
 - c. Komisaris Independen terhadap *Environmental, social, and governance (ESG)* pada perusahaan sub-sektor Perbankan yang terdaftar di BEI periode 2010-2022
 - d. Komite Audit terhadap *Environmental, social, and governance (ESG)* pada perusahaan sub-sektor Perbankan yang terdaftar di BEI periode 2010-2022

1.5 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan wawasan bagi pembacanya, penulis membagi pembaca ke dalam dua aspek, yaitu:

1.5.1 Aspek Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan bagi penelitian selanjutnya selain dari ukuran dewan, *women on the board*, komisaris independen,

dan komite audit dengan variabel dependen yang berpengaruh terhadap *Environmental, Social, and Governance* (ESG).

1.5.2 Aspek Praktis

Bagi perusahaan, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kesadaran dan menjadi bahan evaluasi kinerja perusahaan terhadap *environmental, social, and governance* (ESG).

1.6 Sistematika Penulisan Tugas Akhir

Sistematika penulisan tugas akhir dibutuhkan dalam penulisan tugas akhir. Sistematika penulisan akhir terdiri dari lima bab masing-masing bab disesuaikan penulisan dengan standar penulisan, bagian-bagian dari sistematika dijelaskan pada bagian-bagian berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan isi penelitian secara umum, ringkas, padat, dan tepat. Ini mencakup informasi tentang latar belakang penelitian, objek penelitian, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan prosedur untuk menyusun tugas akhir.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menguraikan kumpulan teori yang merangkum konsep umum hingga spesifik, disertai dengan *review* literatur yang relevan dan penelitian terdahulu. Selain itu, berisi kerangka pemikiran penelitian yang menjadi landasan utama.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini menguraikan pendekatan, metode, dan teknik dimana diterapkan dalam pengumpulan dan analisis data yang digunakan untuk menjawab masalah penelitian.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menguraikan secara sistematis ukuran dewan, *women on the board*, komisaris independen, dan komite audit sesuai dengan perumusan masalah serta tujuan penelitian dan disajikan dalam sub judul tersendiri.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini menguraikan kesimpulan dari hasil penelitian secara singkat berdasarkan jawaban rumusan masalah dan menguraikan saran yang dapat dijadikan pertimbangan untuk peneliti selanjutnya.